

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian serta menganalisa Pola Komunikasi Pemerintah mengenai Kebijakan Mudik selama masa Pandemi Covid-19 dengan studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, serta berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas, penulis mengembangkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi atau pihak pemerintah selama masa pandemi Covid-19 dengan memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk melindungi seluruh masyarakatnya dilakukan melalui media massa dan juga media sosial. Dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Bekasi bekerja sama dengan pihak kementrain. Selain melalui media sosial dan media massa Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga menggunakan youtube untuk mengetahui situasi yang sedang terjadi dilapangan. Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga melakukan komunikasi secara langsung baik dengan para pegawai dan para pedagang serta masyarakat. Selain itu dalam memberikan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah baik dalam kebijakan social distancing, vaksinisasi serta kebijakan mudik, tentu menimbulkan banyak pro dan kontra dimasyarakat terhadap kebijakan tersebut. Salah satunya pada kebijakan mudik yang dimana di Indonesia ini sudah menjadi tradisi masyarakat pada setiap tahun sekali perayaan lebaran idul fitri. Namun pada kasus ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah memperbaiki komunikasi nya kepada masyarakat dengan memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa patuh terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pihak pemerintah.
2. Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi Covid-19 yang awalnya mengalami hambatan karena komunikasi yang disampaikan tidak dengan orang yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi serta kebijakan yang diberikan. Namun dalam hal

ini pemerintah telah memperbaiki cara komunikasinya untuk menunjukkan kepada masyarakat kualitas komunikasi pemerintah. Pola komunikasi masyarakat mengikuti dinamika perkembangan dari Covid-19. Selain itu hambatan dalam kebijakan yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan atau pihak pemerintah yang dimana terlihat pada media massa yang dizaman sekarang ini, terlihat kalau media massa lebih condong sebagai press release nya pemerintah. Sedangkan pada media online lebih sedikit melawan pada kebijakan yang ditetapkan selama masa pandemi Covid-19. Dalam kebijakan mudik ini dimana yang terjadi pada tahun 2021 pemerintah memberikan kelonggaran dalam mobilisasi, namun hal ini malah dicuri-curi oleh masyarakat untuk melakukan mudik, sedangkan pada tahun tersebut masih banyak masyarakat yang terdampak kasus Covid-19.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis akan memberikan saran untuk penelitian yang sejalan dengan pola komunikasi pemerintah, yaitu:

1. Pola komunikasi yang akan disampaikan oleh pemerintah dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat, perlu dilakukan oleh orang yang sebidang dengan kebijakan yang akan diberlakukan. Hal ini agar pemerintah bisa menjelaskan kepada masyarakat lebih jelas mengenai dampak akibat dari kebijakan yang diberlakukan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mengerti, tenang dan menerima dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
2. Dalam hal ini pemerintah juga perlu memahami serta mengidentifikasi letak geografis dan kondisi masyarakatnya seperti apa, karena dari kebijakan yang diberlakukan tentu bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi dibawah tidak bisa mengikuti sepenuhnya kebijakan yang pemerintah berikan.

3. Mengingat penelitian ini membahas mengenai pola komunikasi pemerintah dalam komunikasi politik, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk penelitian yang sejalan dengan pola komunikasi pemerintah selanjutnya dan dengan objek penelitian yang belum diteliti.

